



Dinamika Komunikasi Politik Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2015: Hegemoni Dan Simbol- Simbol Dinasti Politik Di Kabupaten Cianjur

Ridwan Mubarok^{1*} & Yani Nurhasanah²

¹²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*mubaracktanpaobama@gmail.com

ABSTRAK

Kontestasi pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan instrumen penting demokratisasi di Indonesia, tetapi demokrasi elektoral tidak selalu menjamin pemerataan kesempatan politik. Salah satu persoalan yang berkembang ialah politik dinasti, yakni kecenderungan reproduksi kekuasaan melalui hubungan keluarga dan jaringan kekerabatan. Artikel ini menganalisis dinamika komunikasi politik dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Cianjur dengan fokus pada hegemoni dinasti politik, strategi pelanggaran kekuasaan, dan simbol-simbol hegemonik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan strategi studi kasus. Analisis dilakukan melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, serta teori kekuasaan Harold D. Lasswell. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya berlangsung melalui kampanye formal, tetapi juga melalui jaringan kekuasaan, hubungan kekerabatan, birokrasi, partai politik, organisasi masyarakat, media, dan simbol legitimasi. Hegemoni bekerja melalui pembentukan kesadaran, penerimaan, dan normalisasi keberlanjutan kekuasaan keluarga. Kemenangan Irvan Rivano Muhtar-Herman menunjukkan konstruksi politik dinasti sebagai kesinambungan kepemimpinan sebelumnya di Cianjur lokal.

Kata kunci: komunikasi politik, politik dinasti, hegemoni, simbol politik, Pilkada, Cianjur.

ABSTRACT

Direct local elections are an instrument of democratization in Indonesia, yet electoral democracy does not always guarantee political opportunities. One emerging issue is political dynasties, referring to the reproduction of political power through family and kinship networks. This article analyzes political communication dynamics in the 2015

election in Cianjur Regency, focusing on political dynasty hegemony, strategies for maintaining power, and hegemonic symbols. The study employs a qualitative approach, a constructivist paradigm, and a case study strategy. The analysis draws on Antonio Gramsci's theory of hegemony, Peter L. Berger and Thomas Luckmann's social construction theory, and Harold D. Lasswell's theory of power. The findings indicate that political communication occurred through networks, kinship relations, bureaucracy, political parties, community organizations, media, and symbols of legitimacy. Hegemony operated through the formation of awareness, acceptance, and normalization of political continuity. The victory of Irvan Rivano Muhtar-Herman illustrates the construction of political dynasty as leadership continuity.

Keywords: *political communication, political dynasty, hegemony, political symbols, local election, Cianjur.*

PENDAHULUAN

Demokratisasi di Indonesia pascareformasi membawa perubahan mendasar dalam tata kelola politik, terutama melalui perluasan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu instrumen penting dalam proses tersebut. Kepala daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh konfigurasi politik di lembaga legislatif, tetapi memperoleh legitimasi melalui suara masyarakat. Perubahan ini pada dasarnya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya.

Akan tetapi, demokrasi elektoral memiliki paradoks. Mekanisme pemilihan langsung memang membuka ruang kompetisi, tetapi kompetisi tersebut dapat berlangsung tidak seimbang ketika kandidat tertentu memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, birokrasi, media, maupun jaringan sosial. Dalam situasi seperti itu, pemilihan langsung berpotensi menjadi arena reproduksi kekuasaan kelompok tertentu. Salah satu bentuk reproduksi kekuasaan tersebut adalah politik dinasti.

Persoalan politik dinasti menjadi semakin kompleks karena secara normatif seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, politik dinasti tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai persoalan hubungan darah. Problem utamanya terletak pada bagaimana sumber daya kekuasaan yang dimiliki pejabat atau kelompok tertentu digunakan untuk memberikan keuntungan politik kepada anggota keluarga atau jaringan kekuasaannya.

Dokumen penelitian yang menjadi basis artikel ini memperlihatkan bahwa perdebatan politik dinasti memperoleh momentum penting setelah Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan mengenai konflik kepentingan dengan petahana dalam Undang-Undang Pilkada. Perdebatan tersebut memperlihatkan dua perspektif. Di satu sisi, pembatasan terhadap calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak politik warga negara. Di sisi lain, penghapusan pembatasan dapat membuka ruang bagi petahana untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan melalui anggota keluarganya.

Dalam konteks demokrasi, persoalan tersebut penting karena demokrasi bukan sekadar prosedur untuk menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi juga berkaitan dengan distribusi kesempatan, kompetisi yang relatif setara, akuntabilitas, dan kemampuan masyarakat mengontrol kekuasaan. Apabila sumber daya politik terkonsentrasi pada satu keluarga atau jaringan tertentu, maka prosedur elektoral dapat tetap berlangsung, tetapi substansi demokrasi berpotensi mengalami penyempitan.

Kabupaten Cianjur menjadi kasus menarik untuk melihat persoalan tersebut. Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali berlangsung pada 2004. Tjetjep Muhtar Soleh terpilih sebagai Bupati Cianjur dan kemudian kembali terpilih untuk periode kedua pada 2009. Setelah dua periode tersebut, kontestasi Pilkada Cianjur 2015 menghadirkan Irvan Rivano Muhtar, yang dalam dokumen penelitian disebut sebagai putra Tjetjep Muhtar Soleh, sebagai salah satu kandidat. Irvan Rivano Muhtar kemudian terpilih bersama Herman untuk periode 2016–2021.

Konfigurasi tersebut kemudian memunculkan wacana tentang politik dinasti. Dalam dokumen penelitian, Irvan Rivano Muhtar disebut sebagai “putra mahkota” dari Tjetjep Muhtar Soleh. Istilah tersebut tidak semata-mata merupakan sebutan personal, tetapi mengandung makna simbolik yang penting dalam komunikasi politik. Penggunaan istilah “putra mahkota” mengonstruksi seorang kandidat sebagai penerus dari kepemimpinan sebelumnya, bukan semata-mata sebagai individu yang harus memperoleh legitimasi berdasarkan kapasitas dan program politiknya sendiri.

Dalam konteks ini, komunikasi politik memiliki posisi strategis. Komunikasi politik bukan hanya proses penyampaian pesan kampanye kepada pemilih, melainkan juga proses produksi makna mengenai siapa yang dianggap layak memimpin, siapa yang dianggap memiliki legitimasi, serta bagaimana kesinambungan kekuasaan dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, komunikasi politik perlu dibaca sebagai arena produksi dan reproduksi kekuasaan.

Penelitian dalam dokumen awal tersebut secara eksplisit memusatkan perhatian pada tiga persoalan: siapa pelaku praktik dinasti politik di Kabupaten Cianjur, bagaimana strategi politik yang digunakan, dan apa saja simbol hegemonik yang digunakan untuk mempertahankan dinasti politik.

Berdasarkan fokus tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dinamika komunikasi politik dalam kontestasi Pilkada Cianjur 2015 dengan menempatkan politik dinasti sebagai fenomena komunikasi kekuasaan. Pertanyaan utama artikel adalah: bagaimana hegemoni politik dinasti dikonstruksi dalam komunikasi politik Pilkada Cianjur 2015, strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan kesinambungan kekuasaan, dan bagaimana simbol-simbol politik bekerja dalam membangun penerimaan masyarakat?

Kajian ini penting bukan hanya untuk memahami kasus Cianjur, tetapi juga untuk memperluas kajian komunikasi politik di Indonesia. Penelitian terdahulu yang dirujuk dalam dokumen menunjukkan bahwa kajian komunikasi politik telah banyak membahas strategi kampanye, media sosial, jaringan politik, dramaturgi pemimpin, dan relasi kuasa. Namun, penelitian ini memiliki titik tekan berbeda karena menghubungkan komunikasi politik dengan hegemoni dinasti serta simbol-simbol yang digunakan untuk membangun legitimasi politik.

LANDASAN TEORITIS

Komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses pertukaran pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, konflik kepentingan, dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, komunikasi politik berlangsung antara kandidat, partai politik, tim kampanye, birokrasi, media, kelompok kepentingan, dan masyarakat sebagai pemilih.

Komunikasi politik tidak berhenti pada penyampaian visi, misi, program, atau slogan. Di dalamnya terdapat proses pembentukan citra,

identitas, legitimasi, dan persepsi masyarakat. Kandidat berusaha membangun definisi tertentu mengenai dirinya dan lawan politiknya. Dengan demikian, komunikasi politik pada dasarnya merupakan proses kompetisi dalam menentukan makna politik.

Dalam kontestasi yang melibatkan petahana atau keluarga petahana, komunikasi politik dapat memiliki dimensi yang lebih kompleks. Kandidat yang memiliki hubungan dengan penguasa sebelumnya dapat mengomunikasikan dirinya sebagai simbol kesinambungan, stabilitas, dan keberhasilan pemerintahan sebelumnya. Sebaliknya, kelompok oposisi dapat membangun narasi perubahan, koreksi, dan pemerataan kesempatan politik.

Dengan perspektif tersebut, komunikasi politik dalam kasus Cianjur dapat dipahami sebagai arena perebutan definisi mengenai masa depan daerah: apakah masa depan Cianjur harus dipahami sebagai kelanjutan kepemimpinan sebelumnya atau sebagai perubahan terhadap struktur kekuasaan yang telah terbentuk.

Teori utama yang digunakan untuk membaca fenomena politik dinasti dalam penelitian ini adalah teori hegemoni Antonio Gramsci. Dalam dokumen penelitian, hegemoni dijelaskan sebagai bentuk dominasi yang bekerja melalui kepemimpinan moral dan intelektual serta memperoleh persetujuan dari kelompok yang didominasi.

Konsep tersebut penting karena kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan. Kekuasaan dapat bekerja secara lebih efektif ketika kelompok yang berada dalam posisi subordinat menerima nilai, gagasan, dan kepentingan kelompok dominan sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam konteks politik dinasti, mekanisme tersebut dapat berlangsung ketika masyarakat menerima gagasan bahwa anggota keluarga penguasa merupakan penerus yang pantas, memiliki legitimasi, atau dianggap sebagai pilihan paling aman. Dengan demikian, reproduksi kekuasaan tidak selalu dipersepsikan sebagai praktik dominasi. Ia dapat dikonstruksi sebagai kesinambungan kepemimpinan.

Hegemoni karena itu memiliki dimensi komunikatif. Ideologi, simbol, narasi, citra, slogan, hubungan sosial, dan berbagai bentuk komunikasi menjadi instrumen untuk membangun persetujuan. Dalam konteks ini, kemenangan politik bukan hanya hasil dari mobilisasi sumber daya, tetapi juga keberhasilan membentuk cara pandang masyarakat

terhadap realitas politik.

Gramsci juga membedakan antara dominasi yang berbasis persetujuan dan penggunaan kekuatan koersif. Dalam dokumen penelitian ditegaskan bahwa kekuatan koersif cenderung menjadi pilihan terakhir ketika persetujuan spontan gagal. Artinya, kekuasaan yang memperoleh konsensus akan lebih stabil dibandingkan kekuasaan yang semata-mata mengandalkan tekanan.

Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan untuk menjelaskan bagaimana realitas politik dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam perspektif ini, realitas tidak sekadar sesuatu yang berada di luar manusia, tetapi dibentuk, dipelihara, dan direproduksi melalui proses interaksi.

Dokumen penelitian menjelaskan tiga momen dialektis dalam konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses manusia mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sosial. Objektivasi terjadi ketika hasil tindakan manusia tampil sebagai realitas objektif. Sementara internalisasi terjadi ketika realitas objektif tersebut masuk kembali ke dalam kesadaran individu dan memengaruhi cara individu memahami dunia sosial.

Dalam konteks politik dinasti, konstruksi sosial dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang anggota keluarga petahana dikonstruksi sebagai penerus. Pada tahap eksternalisasi, aktor politik memproduksi berbagai pesan, simbol, hubungan, dan tindakan yang menunjukkan kesinambungan. Pada tahap objektivasi, konstruksi tersebut memperoleh bentuk dalam struktur politik, jaringan sosial, media, dan institusi. Selanjutnya, melalui internalisasi, masyarakat dapat menerima konstruksi tersebut sebagai realitas politik yang dianggap wajar.

Dengan demikian, istilah “putera mahkota” dapat dibaca sebagai contoh simbol yang bekerja dalam proses konstruksi sosial. Ia tidak sekadar menyebut hubungan biologis, tetapi menciptakan makna mengenai pewarisan kepemimpinan.

Harold D. Lasswell memahami kekuasaan sebagai kemampuan seorang aktor memengaruhi perilaku aktor lain sehingga perilaku tersebut sesuai dengan keinginan pihak yang memiliki kekuasaan. Perspektif ini memungkinkan politik dinasti dianalisis melalui hubungan antara sumber daya kekuasaan dan perilaku politik aktor lain.

Kekuasaan dapat bersumber dari kedudukan, kekayaan, kepercayaan, jaringan, maupun sumber daya lainnya. Dalam konteks kepala daerah

petahana, jabatan politik memberikan akses terhadap berbagai sumber daya yang dapat memengaruhi struktur politik lokal.

Namun, penting dibedakan antara penggunaan kekuasaan secara legal dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepemilikan jabatan tidak otomatis berarti penyalahgunaan kekuasaan. Persoalan muncul ketika sumber daya publik atau jabatan digunakan untuk memberikan keuntungan politik kepada kandidat tertentu.

Dengan menggabungkan Gramsci, Berger-Luckmann, dan Lasswell, politik dinasti dapat dianalisis melalui tiga lapisan. Pertama, kekuasaan sebagai sumber daya. Kedua, komunikasi sebagai mekanisme produksi persetujuan. Ketiga, simbol sebagai sarana konstruksi realitas dan legitimasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Dinasti sebagai Reproduksi Kekuasaan Lokal

Kasus Cianjur memperlihatkan bagaimana pergantian kepemimpinan dapat sekaligus menjadi proses reproduksi kekuasaan. Tjetjep Muhtar Soleh menjabat sebagai Bupati Cianjur selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2010–2015. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, kontestasi 2015 menghadirkan anaknya, Irvan Rivano Muhtar, sebagai kandidat yang kemudian memenangkan pemilihan bersama Herman untuk periode 2016–2021.

Dari perspektif demokrasi prosedural, pergantian tersebut sah sepanjang berlangsung melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh hukum. Akan tetapi, dari perspektif komunikasi politik dan hegemoni, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut dipersepsikan dan dikonstruksi oleh masyarakat.

Jika seorang kandidat dikonstruksi sebagai “penerus” pemimpin sebelumnya, maka kompetisi elektoral dapat berubah makna. Kandidat tidak hanya menjual dirinya sebagai individu, tetapi juga membawa modal simbolik dari penguasa sebelumnya. Pengalaman, jaringan, reputasi, hubungan sosial, dan identitas keluarga dapat menjadi bagian dari modal politik.

Dalam kasus Cianjur, dokumen penelitian menyebut bahwa Irvan Rivano Muhtar dipersepsikan sebagai “putra mahkota”. Istilah ini merupakan simbol penting karena mengandung metafora pewarisan kekuasaan. Dalam demokrasi, jabatan seharusnya diperoleh melalui

kompetisi dan mandat rakyat, bukan melalui pewarisan. Namun, simbol “putera mahkota” justru membawa logika pewarisan ke dalam arena demokrasi.

Di sinilah komunikasi politik memiliki fungsi hegemonik. Pewarisan kekuasaan tidak perlu dikatakan secara eksplisit sebagai “warisan jabatan”. Ia dapat dikomunikasikan melalui bahasa kesinambungan, kedekatan, pengalaman, jaringan, dan loyalitas terhadap pemerintahan sebelumnya.

Struktur Aktor dan Jaringan Kekuasaan

Dokumen penelitian mengidentifikasi bahwa penelitian mengenai politik dinasti di Cianjur perlu melihat berbagai aktor, termasuk tim sukses, eksekutif, legislatif, yudikatif, penyelenggara pemilu, dan media massa. Struktur tersebut menunjukkan bahwa politik lokal tidak dapat dibaca sebagai relasi antara kandidat dan pemilih semata. Di antara keduanya terdapat jaringan institusional dan sosial yang berfungsi sebagai perantara komunikasi politik.

Dalam kerangka teori Lasswell, setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda. Birokrasi memiliki sumber daya administratif; partai politik memiliki sumber daya organisasi; media memiliki sumber daya komunikasi; tokoh masyarakat memiliki sumber daya legitimasi sosial; sedangkan kandidat memiliki sumber daya elektoral.

Apabila berbagai sumber daya tersebut bergerak dalam arah yang sama, maka kandidat tertentu akan memiliki keuntungan struktural dibandingkan kandidat lain.

Dokumen penelitian menyebut adanya dugaan pengkondisian legislatif, media massa, dan lembaga penyelenggara pemilu dalam perjalanan politik IRM. Karena pernyataan tersebut berasal dari dokumen penelitian dan bukan dari verifikasi independen dalam artikel ini, ia perlu dipahami sebagai temuan atau klaim empiris yang hendak diuji oleh penelitian, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Kehati-hatian tersebut penting dalam penulisan jurnal ilmiah. Penelitian tentang politik selalu berhadapan dengan tuduhan, persepsi, klaim, dan fakta hukum yang berbeda. Karena itu, komunikasi politik harus dianalisis dengan membedakan antara apa yang dikatakan aktor, apa yang dipersepsikan masyarakat, dan apa yang dapat dibuktikan secara empiris.

Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestasi

Strategi komunikasi politik dalam kontestasi Pilkada Cianjur dapat dibaca melalui beberapa dimensi.

Pertama adalah strategi kesinambungan. Kandidat yang berasal dari keluarga petahana memiliki peluang untuk mengomunikasikan kesinambungan pemerintahan sebagai keunggulan politik. Kesinambungan dapat dipresentasikan sebagai stabilitas, pengalaman, dan jaminan bahwa program sebelumnya akan diteruskan.

Kedua adalah strategi jaringan. Hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya dapat membuka akses terhadap jaringan politik yang telah dibangun selama masa pemerintahan. Jaringan tersebut dapat meliputi partai politik, birokrasi, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan media.

Ketiga adalah strategi simbolik. Identitas sebagai anak dari kepala daerah sebelumnya merupakan simbol yang memiliki nilai politik. Simbol tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan kandidat dengan popularitas, pengalaman, dan jaringan pemimpin sebelumnya.

Keempat adalah strategi mobilisasi. Dokumen penelitian menyebut adanya dugaan mobilisasi ASN, organisasi ARWT dan Apdesi, serta media massa lokal untuk mendukung pasangan IRM-Herman. Dalam artikel ini, hal tersebut dipahami sebagai bagian dari klaim empiris yang menjadi objek penelitian, bukan sebagai kesimpulan hukum.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik bekerja dalam ruang formal dan informal. Kampanye resmi hanya merupakan salah satu bagian. Komunikasi politik juga berlangsung melalui hubungan personal, struktur birokrasi, organisasi masyarakat, pemberitaan, simbol, dan interaksi sehari-hari.

Simbol “Putera Mahkota” dan Produksi Legitimasi

Salah satu simbol paling penting dalam kasus Cianjur adalah istilah “putera mahkota”. Dalam konteks kerajaan, putera mahkota berarti calon penerus takhta. Ketika istilah tersebut digunakan dalam demokrasi, terjadi pergeseran makna yang menarik.

Demokrasi tidak mengenal konsep pewarisan jabatan politik berdasarkan garis keturunan. Namun, budaya politik dapat membawa simbol-simbol pewarisan ke dalam arena elektoral. Karena itu, simbol “putera mahkota” menjadi bentuk komunikasi politik yang

mempertemukan dua logika: logika demokrasi dan logika pewarisan kekuasaan.

Dalam perspektif Berger dan Luckmann, simbol tersebut dapat membentuk realitas sosial melalui proses berulang. Jika masyarakat terus-menerus menerima seorang kandidat sebagai “penerus”, maka identitas tersebut dapat menjadi realitas sosial yang dianggap normal.

Dalam perspektif Gramsci, kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika masyarakat tidak lagi melihat pewarisan kekuasaan sebagai persoalan, tetapi menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Di sinilah hegemoni bekerja. Dominasi tidak harus dipaksakan; ia dapat hadir melalui persetujuan.

Dengan demikian, komunikasi politik dinasti tidak harus selalu berupa propaganda eksplisit. Ia dapat bekerja melalui normalisasi. Ketika masyarakat menerima narasi “kelanjutan” dan “penerus” tanpa mempertanyakan struktur kesempatan yang tidak seimbang, maka hegemoni telah memperoleh ruang.

Budaya Politik dan Penerimaan terhadap Kekuasaan

Dokumen penelitian juga menggambarkan kecenderungan budaya politik masyarakat Cianjur dengan istilah *siger tengah*, yaitu kecenderungan mencari posisi aman dan mengikuti kebijakan penguasa. Dokumen tersebut menghubungkannya dengan kecenderungan politik yang oportunis, pragmatis, dan hedonis.

Terlepas dari perlu tidaknya istilah tersebut diuji kembali melalui penelitian empiris, konsep ini penting untuk menjelaskan bagaimana budaya politik dapat berinteraksi dengan hegemoni.

Hegemoni tidak dapat bekerja tanpa kondisi sosial tertentu. Ia membutuhkan lingkungan komunikasi yang memungkinkan pesan kekuasaan diterima. Masyarakat yang sangat kritis, memiliki akses informasi luas, dan memiliki institusi masyarakat sipil yang kuat cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk mempertanyakan dominasi.

Sebaliknya, apabila relasi patron-klien kuat, masyarakat bergantung pada sumber daya penguasa, dan kritik dianggap sebagai ancaman, maka ruang bagi komunikasi hegemonik menjadi lebih besar.

Dalam konteks tersebut, budaya politik bukan sekadar latar belakang. Ia menjadi bagian dari mekanisme komunikasi politik. Sikap mencari aman dapat membuat masyarakat menerima pesan penguasa tanpa proses evaluasi kritis yang memadai.

Karena itu, persoalan politik dinasti tidak hanya terletak pada aktor yang berusaha mempertahankan kekuasaan. Ia juga berkaitan dengan ekosistem sosial yang memungkinkan reproduksi kekuasaan tersebut berlangsung.

Birokrasi sebagai Arena Komunikasi Politik

Salah satu isu penting dalam dokumen penelitian adalah dugaan penggunaan atau mobilisasi birokrasi untuk mendukung kepentingan politik petahana. Dokumen menyebut mobilisasi ASN dalam rangka memenangkan pasangan IRM-Herman.

Jika dianalisis melalui teori kekuasaan, birokrasi memiliki posisi strategis karena menguasai informasi, pelayanan publik, administrasi, dan hubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, birokrasi tidak hanya merupakan institusi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas komunikasi politik yang besar.

Dalam negara demokratis, birokrasi idealnya bersifat profesional dan netral. Ketika birokrasi masuk ke dalam kompetisi politik partisan, maka batas antara negara dan kepentingan politik dapat menjadi kabur.

Dari perspektif hegemoni, birokrasi dapat menjadi bagian dari apparatus yang membantu mempertahankan dominasi, terutama jika struktur birokrasi tidak memiliki otonomi yang cukup. Akan tetapi, penelitian harus membedakan antara mobilisasi yang benar-benar terjadi, dugaan mobilisasi, dan persepsi masyarakat mengenai mobilisasi tersebut.

Perbedaan ini penting karena komunikasi politik bekerja melalui persepsi. Bahkan ketika suatu tindakan belum terbukti secara hukum, persepsi masyarakat mengenai keberpihakan birokrasi tetap dapat memengaruhi legitimasi politik.

Media Massa dan Produksi Realitas Politik

Media massa merupakan aktor penting dalam proses pembentukan realitas politik. Dokumen penelitian menyebut adanya dugaan mobilisasi media massa lokal untuk mendukung pasangan IRM-Herman.

Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi. Media juga melakukan seleksi, penonjolan, pengulangan, dan pembingkaihan terhadap suatu peristiwa. Karena itu, ketika kandidat tertentu memperoleh eksposur lebih besar, citra politik kandidat tersebut dapat menjadi lebih dominan dalam ruang publik.

Perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann membantu menjelaskan proses tersebut. Realitas sosial objektif diolah melalui proses seleksi dan representasi menjadi realitas simbolik. Masyarakat kemudian mengonsumsi realitas simbolik tersebut dan dapat menginternalisasikannya sebagai realitas objektif.

Dalam konteks dinasti politik, media dapat memperkuat atau menantang simbol kesinambungan. Media dapat menampilkan kandidat sebagai penerus yang berpengalaman, atau sebaliknya sebagai simbol politik dinasti. Dengan demikian, media menjadi arena perebutan makna.

Jika media terlalu dekat dengan kekuasaan, keberagaman perspektif dapat menyempit. Sebaliknya, media yang independen dapat menyediakan ruang bagi kritik dan kontra-hegemoni.

Koalisi Politik dan Efektivitas Jaringan

Temuan komparatif dalam dokumen penelitian menunjukkan bahwa jumlah partai pendukung tidak selalu menentukan kemenangan. IRM-Herman disebut hanya memperoleh dukungan tiga partai koalisi, tetapi mampu memenangkan Pilkada Cianjur 2015, sementara pasangan Suranto-Oki disebut memperoleh dukungan koalisi delapan partai.

Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa kekuatan politik tidak selalu identik dengan jumlah partai. Efektivitas jaringan, konsolidasi, figur, sumber daya, dan kemampuan mengomunikasikan pesan politik dapat lebih menentukan daripada ukuran koalisi.

Dengan kata lain, komunikasi politik merupakan persoalan kualitas jaringan, bukan hanya kuantitas dukungan. Dalam konteks dinasti politik, jaringan yang dibangun selama masa kekuasaan sebelumnya dapat menjadi modal yang sangat berharga. Jaringan tersebut memungkinkan transfer modal politik dari petahana kepada kandidat yang memiliki hubungan keluarga.

Transfer tersebut dapat terjadi dalam bentuk dukungan politik, rekomendasi, hubungan dengan elite lokal, akses media, pengaruh sosial, dan legitimasi simbolik.

Politik Dinasti antara Legalitas dan Etika Demokrasi

Persoalan paling penting dari politik dinasti adalah perbedaan antara legalitas dan etika demokrasi.

Secara legal, anggota keluarga pejabat publik memiliki hak yang sama untuk menjadi kandidat. Karena itu, larangan berbasis hubungan darah dapat menimbulkan persoalan konstitusional. Namun, secara etis,

persoalan muncul ketika jabatan publik digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keunggulan tidak wajar bagi keluarga.

Dengan demikian, politik dinasti tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan hubungan kekerabatan. Parameter yang lebih relevan adalah apakah terdapat kesetaraan kesempatan, kompetisi yang fair, netralitas birokrasi, independensi media, transparansi sumber daya kampanye, dan kebebasan memilih.

Dalam konteks ini, politik dinasti dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, dinasti elektoral, ketika anggota keluarga pejabat terpilih karena memiliki popularitas dan dukungan masyarakat melalui kompetisi yang relatif fair. Kedua, dinasti hegemonik, ketika kekuasaan sebelumnya digunakan untuk membentuk kondisi politik yang membuat anggota keluarga memperoleh keuntungan struktural.

Dampak terhadap Demokrasi Lokal

Dokumen penelitian mencatat berbagai persoalan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan Cianjur selama dua periode pemerintahan Tjetjep Muhtar Soleh, antara lain persoalan infrastruktur, pendidikan, IPM, kemiskinan, alih fungsi lahan, rotasi jabatan, serta dugaan praktik KKN.

Data tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati karena dokumen tidak menyediakan pembuktian empiris lengkap untuk setiap klaim. Namun, secara konseptual, daftar tersebut menunjukkan bahwa penelitian politik dinasti tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang menang”, tetapi juga harus mempertanyakan konsekuensi dari konsentrasi kekuasaan terhadap tata kelola pemerintahan.

Apabila jaringan kekuasaan terlalu terkonsentrasi, mekanisme kontrol dapat melemah. Hubungan antara eksekutif, legislatif, birokrasi, media, dan kelompok masyarakat sipil dapat menjadi tidak seimbang.

Dalam perspektif Gramsci, persoalan tersebut berhubungan dengan kemampuan kelompok dominan membentuk konsensus. Selama kelompok subordinat menerima sistem tersebut sebagai sesuatu yang wajar, dominasi dapat bertahan.

Karena itu, demokrasi lokal membutuhkan mekanisme kontra-hegemoni. Media independen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, oposisi politik, dan masyarakat yang kritis dapat memainkan peran untuk mempertanyakan konstruksi dominan.

PENUTUP

Dinamika komunikasi politik dalam kontestasi Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Cianjur memperlihatkan bahwa kompetisi politik lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertarungan antarcalon dalam memperoleh suara. Kontestasi juga merupakan arena perebutan sumber daya, jaringan, legitimasi, simbol, dan definisi mengenai siapa yang dianggap layak memimpin.

Kasus Cianjur menunjukkan adanya hubungan antara kepemimpinan petahana selama dua periode dengan munculnya kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan petahana. Irvan Rivano Muhtar, sebagai putra Tjetjep Muhtar Soleh, kemudian memenangkan Pilkada 2015 bersama Herman untuk periode 2016–2021. Konfigurasi tersebut menjadi dasar penting bagi munculnya wacana politik dinasti di Kabupaten Cianjur.

Dari perspektif Gramsci, politik dinasti dapat berkembang ketika dominasi tidak hanya bekerja melalui sumber daya kekuasaan, tetapi juga melalui persetujuan masyarakat. Simbol, narasi, hubungan sosial, jaringan politik, dan media dapat membentuk persepsi bahwa keberlanjutan kekuasaan merupakan sesuatu yang wajar.

Dari perspektif Berger dan Luckmann, keberlanjutan dinasti politik dapat dipahami sebagai proses konstruksi sosial. Identitas kandidat sebagai penerus, misalnya, dapat dibentuk melalui komunikasi berulang dan kemudian menjadi realitas politik yang diterima masyarakat.

Sementara itu, perspektif Lasswell menunjukkan bahwa kekuasaan politik berkaitan erat dengan kemampuan memengaruhi perilaku aktor lain. Jabatan, jaringan, birokrasi, media, organisasi sosial, dan sumber daya politik dapat menjadi instrumen pengaruh dalam kontestasi.

Dengan demikian, simbol-simbol hegemonik memiliki posisi penting dalam politik dinasti. Simbol “putra mahkota” merupakan salah satu contoh bagaimana bahasa dapat mengubah persepsi terhadap pewarisan kekuasaan. Dalam demokrasi, jabatan seharusnya merupakan hasil kompetisi dan mandat rakyat, tetapi simbol pewarisan dapat mengonstruksi kandidat sebagai penerus alami dari kekuasaan sebelumnya. Artikel ini juga menunjukkan bahwa politik dinasti perlu dibedakan dari sekadar pencalonan anggota keluarga pejabat. Persoalan demokratis terletak pada ada atau tidaknya penggunaan sumber daya kekuasaan untuk menciptakan kompetisi yang tidak seimbang.

Kajian ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, penguatan demokrasi lokal tidak cukup dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Demokrasi juga membutuhkan institusi yang mampu memastikan kompetisi politik berjalan fair.

Kedua, netralitas birokrasi perlu diperkuat. Birokrasi harus menjadi institusi pelayanan publik, bukan instrumen reproduksi kekuasaan politik. Ketiga, media lokal harus memiliki independensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyediakan ruang bagi beragam perspektif politik.

Keempat, masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan politik. Pemilih tidak cukup hanya diberi informasi mengenai kandidat, tetapi juga perlu memiliki kemampuan membaca simbol, narasi, citra, dan strategi komunikasi politik.

Kelima, penelitian mengenai politik dinasti perlu bergerak dari sekadar studi tentang keluarga politik menuju kajian mengenai ekosistem kekuasaan. Ekosistem tersebut mencakup partai politik, birokrasi, media, pengusaha, organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan pemilih.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sekadar memungkinkan masyarakat memilih, tetapi demokrasi yang memungkinkan masyarakat memilih secara bebas, rasional, kritis, dan berdasarkan kompetisi yang adil. Demokrasi harus mencegah konsentrasi kekuasaan berubah menjadi monopoli kesempatan. Karena itu, komunikasi politik idealnya tidak digunakan untuk menormalisasi pewarisan kekuasaan, tetapi untuk memperkuat partisipasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1972). *The Idea of Power in Javanese Culture*. Dalam berbagai kajian mengenai politik dan kekuasaan Jawa.
- Andrain, C. F. (1992). *Political Power and Social Change*. California: Wadsworth.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE.

- Dahl, R. A. (1978). *Modern Political Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Ginting, T. A. (2004). *Komunikasi Politik dan Preferensi Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2004: Studi di Kabupaten Karo*. Universitas Sumatera Utara.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta.
- Hendarto, P. (1993). *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci*. Jakarta.
- Indrananto, C. (2012). *Pemimpin Daerah sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo*. Universitas Indonesia.
- Lasswell, H. D. (1984). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: Meridian Books.
- Mas'ood, M., & Nasikun. (1987). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rosit, M. (2011). *Strategi Komunikasi Politik dalam Pilkada: Studi Kasus Strategi Pemenangan Pasangan Ratu Atut dan Rano Karno dalam Memenangkan Pilkada Banten 2011*. Universitas Indonesia.
- Sugiono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, T. (2013). *Analisis Strategi Komunikasi Tim Sukses Ridwan Kamil dalam Pemilihan Walikota Bandung 2013: Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik melalui Media Sosial Twitter*. Universitas Islam Bandung.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Yustian, Y. (2008). *Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendaftar Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor*. Institut Pertanian Bogor.